

MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL: TINJAUAN ATAS SUATU KEBIJAKAN

Dionisius Bawole*, Yolanda M T N Apituley

Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Pattimura, Ambon. *e-mail: *dion_bawole@yahoo.com*

ABSTRAK

Kebijakan “Menjadi Lumbung Ikan Nasional” berarti menjadikan Maluku sebagai salah satu produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional serta menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Secara umum, produksi perikanan tangkap Maluku mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai 2008 walaupun bervariasi, namun tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 15,44%. Kondisi aktual sumberdaya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) laut Maluku pada tahun 2010, menunjukkan hampir semua jenis ikan sudah mengalami kondisi eksploitasi maksimum (*fully-exploited*) dan hasil tangkap lebih (*over-fishing*). Kondisi ini mengharuskan upaya pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Prinsip pengaturan ini dapat didekati dengan dua metode yaitu kontrol input berupa pembatasan upaya melalui perijinan, pembatasan ukuran kapal, pembatasan ukuran alat tangkap dan pembatasan unit waktu, sedangkan kontrol output adalah melalui penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, pembagian kuota individu menurut armada, perusahaan dan nelayan. Kebijakan serta kondisi aktual di atas dapat dijumpai melalui pemberian pemahaman kepada seluruh masyarakat Maluku bahwa pengembangan perikanan tangkap seharusnya tidak diukur hanya dari gambaran peningkatan produksi yang masih bisa dilakukan, tetapi pada jumlah usaha industri yang menguntungkan secara ekonomi, dipertanggung jawabkan secara sosial dan tidak merusak lingkungan, sehingga dapat menopang kehidupan masyarakat pantai, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Kata kunci: lumbung ikan, pengelolaan

PENDAHULUAN

Latarbelakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, terdiri atas lautan dan pulau-pulau kecil. Wilayah perairan laut Indonesia yang luasnya diperkirakan mencapai 5,8 juta km² atau sekitar 2/3 dari wilayah Indonesia dengan garis pantai 81.000 km, memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang berlimpah dan beraneka ragam.

Menurut data yang dirilis tahun 2004, potensi lestari atau *maximum sustainable yield* (MSY) sumberdaya ikan yang terdapat di perairan laut Indonesia diperkirakan 6,4 juta ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau *total allowable catch* (TAC) sebesar 5,12 juta ton/tahun atau 80% dari MSY dengan

produksi tahunan sebesar 4,7 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan laut telah mencapai 73% dari MSY (Simbolon 2011).

Perilaku manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan akan sangat mempengaruhi jumlah stok ikan yang berada di laut. Laju pertumbuhan populasi ikan akan terus meningkat dan kemudian menurun setelah mencapai titik optimum pertumbuhannya, sedangkan perilaku manusia dalam mengekstraksi perikanan akan terus meningkat selama masih terlihat adanya keuntungan dari kegiatan penangkapan ikan. Pada akhirnya akan terjadi inefisiensi ekonomi karena pelaku usaha tidak mendapatkan keuntungan yang optimum dari kegiatan ekstraksi sumberdaya perikanan.

Penangkapan berlebih atau *over-fishing* sudah menjadi kenyataan pada berbagai perikanan tangkap di dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan 75% dari perikanan laut dunia sudah tereksploitasi penuh, mengalami tangkap lebih atau stok yang tersisa bahkan sudah terkuras dan hanya 25% dari sumberdaya masih berada pada kondisi tangkap kurang. Total produksi perikanan tangkap dunia pada tahun 2000 ternyata 5% lebih rendah dibanding puncak produksi pada tahun 1995 (tidak termasuk Cina, karena unsur ketidakpastian dalam statistik perikanan mereka). Sekali terjadi penipisan sumberdaya, maka stok ikan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali, walaupun telah dilakukan penghentian penangkapan (Wiadnya *et al.* 2005).

Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional

Dalam pemaparannya pada Seminar Nasional Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional pada tahun 2010, Gubernur Maluku mengatakan bahwa membangun Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional berarti menjadikan daerah tersebut sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Maluku juga diharapkan akan mampu menjadi pusat riset laut-laut dalam dan pulau-pulau kecil berkelas dunia guna mendukung peran Indonesia dalam perekonomian global. Implikasi dari kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah, akademisi dan masyarakat pada umumnya untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan yang dimiliki secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Menurut Watloly (2010), secara filosofi lumbung memiliki 2 arti yaitu statis (penyimpan) dan dinamis (keberlanjutan). Arti statis adalah 1) Tempat penyimpanan stok (pangan & bibit) secara temporer; 2) Tempat menyimpan barang hasil jadi (statis); 3) Dapat dikosongkan sesuai irama dan siklus musim; 4) Terisolasi dari lingkungan habitat; 5) Bukan tempat produk lestari. Sedangkan arti dinamis (keberlanjutan) adalah 1) Tempat memproduksi, bereproduksi berjenis ikan secara lestari; 2) Ajang tabur-tuai yang selalu terisi; 3) Menjadi sentra produksi dan pertumbuhan habitat baru; 4) Menyatu dengan lingkungan habitat, terisi dan berkelanjutan; dan 5) Wilayah tangkap dan produk lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Jika mengacu pada UU No. 31 tahun 2004 dan diperbaharui menjadi UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, maka lumbung ikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pengelolaan seperti pada pasal 3 yang mengamanatkan tujuan pengelolaan perikanan adalah

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal; dan menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Memang bukanlah perkara mudah untuk memadukan antara keberlanjutan (kelestarian) sumberdaya perikanan di satu sisi dan peningkatan penerimaan dan devisa negara di sisi lain. Dalam proses peningkatan penerimaan dan devisa negara, pelaksanaannya cenderung mengarah pada pengurusan sumberdaya perikanan, sehingga kurang terasa penghargaan terhadap sumberdaya untuk keberlanjutannya.

Potensi dan Produksi Perikanan Provinsi Maluku

Sebagai salah satu provinsi kepulauan, Maluku memiliki luas wilayah 581.376 km² yang terdiri dari luas lautan sebesar 527.191 km² dan daratan 54.185 km². Dengan kata lain, 90% wilayah provinsi Maluku adalah lautan, yang di dalamnya terdapat potensi sumberdaya perikanan sebesar 1.640.160 ton/tahun sesuai dengan hasil kajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Oceanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2001. Potensi sumberdaya hayati perikanan dimaksud terdiri dari pelagis, demersal dan biota laut lainnya yang perlu dieksploitasi secara optimal (DKP Provinsi Maluku 2008).

Potensi Perikanan Tangkap di Maluku berdasarkan kabupaten dan kota dapat dilihat pada Tabel 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP-RI 714 meliputi wilayah kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat dengan potensi 248,4 ton/tahun. WPP-RI 715 meliputi wilayah kabupaten Maluku Tengah dengan potensi 587,00 ton/tahun dan WPP-RI 718 dengan wilayah kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya dengan potensi 1.430.600 ton/tahun. Sedangkan data yang dikeluarkan Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan terlihat ada perbedaan estimasi potensi sumberdaya ikan pada masing-masing WPP. Data Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan untuk WPP 714 potensi sebesar 278 ton/tahun, WPP 715 sebesar 595,6 ton/tahun dan WPP 718 sebesar 855,5 ton/tahun. Adanya perbedaan data dan pendekatan yang digunakan dalam perhitungan dapat menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan potensi tersebut.

Tabel 1. Potensi Perikanan Tangkap Berdasarkan Kabupaten dan Kota.

No	Kabupaten/ Kota	Uraian	Potensi (ton/thn)	Komoditas Unggulan
1	Kota Ambon	Laut PUD		Tuna, Cakalang, Layang, Kerapu
2	Maluku Tengah (WPP-RI 714 & WPP-RI 715)	Laut PUD		Tuna, Cakalang, Layang, Kerapu
3	Maluku Tenggara (WPP-RI 714 & WPP-RI 718)	Laut PUD		Tuna, Cakalang, Layang, Kerapu
4	Maluku Tenggara Barat	Laut PUD Laut	WPP-RI 714: 248,4	Tuna, Cakalang, Layang, Kerapu Tuna, Cakalang, Tenggiri,
5	Buru	PUD		Layang, Kerapu, Kuwe, Mujair, Nila, Mas
6	Seram Bagian Barat	Laut PUD Laut	WPP-RI 715: 587,00	Tuna, Tongkol, Cakalang Tuna, Cakalang, Tongkol,
7	Seram Bagian Timur	PUD		Julung-julung, Baronang, Kerapu, Udang
8	Kepulauan Aru (WPP-RI 718)	Laut PUD	WPP-RI 718: 1.430.600	Tuna, Cakalang, Tenggiri, Layang, Kembung, Kuwe, Kerapu, Kakap, Udang
9	Kota Tual	Laut PUD		Tuna, Cakalang, Tenggiri, Layang, Kembung, Kuwe, Kerapu, Kakap
10	Maluku Barat Daya (WPP-RI 714 & WPP-RI 718)	Laut		Tuna, Cakalang, Kerapu, Kakap, Kembung, Lalosi, Layang.

Sumber: Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010).

Produksi perikanan tangkap Maluku dari tahun 2005 sampai 2008 seperti terlihat pada Tabel 2, secara umum mengalami kenaikan walaupun bervariasi, sedangkan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 15,44%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh ketidakpastian cuaca dan iklim yang melanda dunia secara global atau karena kondisi aktual sumberdaya perikanan di Maluku (Tabel 3) sehingga secara keseluruhan mempengaruhi produksi tangkapan.

Tabel 3 menggambarkan kondisi aktual sumberdaya perikanan di laut Maluku, dimana hampir semua jenis ikan mengalami kondisi eksploitasi tangkap maksimum (*fully-exploited*) dan tangkap lebih (*over-exploited*). Data dari Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan tahun 2010 juga memperlihatkan hal yang sama. Pada WPP 714, status tingkat eksploitasi sumberdaya perikanan menunjukkan hanya jenis ikan cakalang dan cumi-cumi yang berada dalam kondisi *moderate*, sehingga dapat dieksploitasi tanpa mengganggu kelestarian walaupun *Catch Per Unit Effort* (CPUE) mungkin mulai menurun, sedangkan ikan demersal, pelagis kecil dan madidihang dalam kondisi *fully-exploited*. Status *moderate* pada WPP 715 hanya ditunjukkan oleh jenis ikan cakalang dan ikan demersal, sementara pada WPP 718 hampir semua jenis ikan dalam kondisi *over-exploited* dan *fully-exploited*, hanya jenis ikan pelagis kecil dalam kondisi *moderate* (Lampiran 1).

Tabel 2. Produksi Perikanan Maluku Berdasarkan Kabupaten dan Kota.

No	Kabupaten/Kota	Uraian	Keragaan				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	Kota Ambon	Laut	7.821	7.915	8.010	8.106	8.203
		PUD	-	-	-	-	-
2	Maluku Tengah (WPP-RI 714 & WPP-RI 715)	Laut	43.307,10	63.822,90	88.253,00	101.541,60	69.147,65
		PUD	-	-	-	-	-
3	Maluku Tenggara (WPP-RI 714 & WPP-RI 718)	Laut	131.353,90	158.629,50	160.326,90	88.600,20	80.168,13
		PUD	-	-	-	-	-
4	Maluku Tenggara Barat	Laut	32.275,00	12.615,00	13.560,00	14.793,00	14.986,00
		PUD	-	-	-	-	-
5	Buru	Laut	6.985,70	7.056,10	7.361,60	5.383,81	6.950,20
		PUD	-	-	-	-	-
6	Seram Bagian Barat	Laut	1.389,00	1.144,00	1.269,00	1.734,00	1.986,00
		PUD	-	-	-	-	-
7	Seram Bagian Timur	Laut	1.650,00	1.700,00	2.750,00	3.000,00	3.050,00
		PUD	-	-	-	-	-
8	Kepulauan Aru (WPP-RI 718)	Laut	51.176,69	52.798,27	52.427,39	53.064,00	53.708,00,67
		PUD	-	-	-	-	-
9	Kota Tual	Laut	-	-	-	59.067,00	45.013,00
		PUD	-	-	-	-	-
10	Maluku Barat Daya (WPP-RI 714 & WPP-RI 718)	Laut	7.000,00	7.187,00	7.290,00	7.450,00	7.585,00
		PUD	-	-	-	-	-
11	Buru Selatan	Laut	-	-	-	-	-
		PUD	-	-	-	-	-
T o t a l		Laut	253.038,00	303.952,00	333.238,00	336.942,00	284.910,00
		PUD	-	-	-	-	-

Sumber: Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010).

Tabel 3. Kondisi Aktual Sumberdaya Perikanan di Laut Maluku

No	Jenis Ikan	Potensi	JTB/Tahun	Kondisi Eksploitasi
		Lestari/Tahun (ton)	(ton)	
1	Pelagis Kecil	979.000	783.600	Tangkap lebih
2	Pelagis Besar	261.000	209.000	Maksimum
3	Demersal	339.900	271.800	Tangkap lebih
4	Ikan Karang	12.800	10.200	-
5	Udang	23.100	18.400	Maksimum
6	Ikan Hias	505.700	404.600	Maksimum
7	Cumi-cumi	10.600	8.500	-

Sumber: Souselisa *dalam* Watloly (2010).

Dalam kondisi seperti ini, kebijakan pemerintah yang menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional diperhadapkan dengan tantangan yang sangat besar sehingga dibutuhkan suatu strategi dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya tersebut.

Strategi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Maluku

Informasi di atas memberikan gambaran bahwa tekanan penangkapan di WPP yang ada di Maluku sudah sangat menguatirkan. Di sisi lain salah satu indikator kinerja utama perikanan tangkap adalah meningkatnya armada perikanan tangkap skala menengah dan besar. Hal ini perlu dipertimbangkan kembali, jika melihat kondisi perikanan di provinsi Maluku.

Kondisi seperti ini mengharuskan adanya upaya pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian. Kontrol input melalui pembatasan terhadap upaya penangkapan yang diizinkan merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat dilakukan, di samping strategi pengelolaan lainnya seperti regulasi selektivitas alat tangkap dan pembatasan waktu penangkapan (Purbayanto *et al.* 2010). Lebih lanjut Widodo dan Suadi (2005) menyatakan bahwa, prinsip pengaturan perikanan dapat didekati dengan dua metode yaitu pengaturan *input* berupa pembatasan upaya melalui perijinan, pembatasan ukuran kapal, pembatasan ukuran alat tangkap dan pembatasan unit waktu, sedangkan pengaturan *output* penangkapan adalah penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, pembagian kuota individu menurut armada, perusahaan dan nelayan.

Pembatasan usaha secara definitif akan menyebabkan penurunan total hasil tangkap dalam jangka pendek, sehingga menyebabkan gagalnya peluang (dalam jangka sangat pendek) memberikan kontribusi terhadap sasaran KKP secara keseluruhan. Kerugian jangka pendek yang diakibatkan dari pengelolaan restriktif (bidang penangkapan) hampir tidak mungkin bisa ditutupi melalui perluasan budidaya ikan yang memerlukan investasi modal, atau eksplorasi sumberdaya yang masih belum terjamah yang mungkin pada kenyataannya tidak ada, ataupun kalau ada, tidak akan menguntungkan secara ekonomis (Wiadnya *et al.* 2005).

Salah satu jalan untuk memecahkan kebuntuan ini adalah dengan membangun pemahaman kepada seluruh masyarakat Maluku, bahwa pengembangan perikanan tangkap seharusnya tidak diukur dari gambaran peningkatan produksi yang masih bisa dilakukan, tetapi pada jumlah usaha industri yang menguntungkan secara ekonomi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan tidak merusak lingkungan, sehingga dapat menopang kehidupan masyarakat pantai, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. 2008. Buku Tahunan Statistik Perikanan Provinsi Maluku.
- Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010. Roadmap Pembangunan Perikanan Tangkap Tahun 2010-2014 Provinsi Maluku.
- Purbayanto A. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap. Materi Kuliah. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (*tidak dipublikasikan*).

- Purbayanto A, Riyanto M. Fitri ADP. 2010. Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan Pada Perikanan Tangkap. Bogor: IPB Pr.
- Simbolon D. 2011. Bioekologi Dan Dinamika Daerah Penangkapan Ikan. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB.
- Watloly A. 2010. Filofosi Lumbung Ikan: Implikasi bagi Maluku dan Indonesia. Materi Ceramah Seminar Nasional: Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional. 2 Juni 2010.
- Wiadnya DGR, Djohani R, Erdmann MV, Halim A, Knight M, Mous PJ, Pet J, Pet-Soede L. 2005. Kajian Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Indonesia: Menuju Pembentukan Kawasan Perlindungan Laut. <http://www.coraltrianglecenter.org> (Diunduh tanggal 10 Juni 2011).
- Widodo J dan Suadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pr.

ampiran 1. Status Tingkat Eksploitasi Sumberdaya Ikan Di WPP RI, Desember 2010.

Kelompok SDI	Wilayah Pengelolaan Perikanan											Keterangan
	Selat Malaka	S. Hindia (Barat Sumatera)	S. Hindia (Selatan Jawa)	Laut Cina Selatan	Laut Jawa	Selat Makasar-L. Flores	Laut Banda	Teluk Tomini-Laut Seram	Laut Sulawesi	S. Pasifik	Laut Arafura-L. Timor	
	WPP-571	WPP-572	WPP-573	WPP-711	WPP-712	WPP-713	WPP-714	WPP-715	WPP-716	WPP-717	WPP-718	
UDANG	O	O	O	O	O	O		O		O	F	
DEMERSAL	F	F	M	F	F	O	F	M	M	M	O(*)	(*) dampak dari pukat ikan
-Kurisi	O			O								
-Manyung	O			F					M		O	
-Layur		M	M									
-Kurisi	F	F			M(1)						O	(1) Laut Jawa >40 m
-Kuniran	F	F			F						O	
-Swanggi	F	F			M(1)						O	
-Blosong	F	F			F						O	
-Gulamah	F	F									O	(2) Khusus pancing
-Kakap Merah	O(3)	O(4)	F(5)		O	M(2)		F	M		O	(3) Khusus pancing
-Kerapu		O(4)			O	M(2)		F	M		O	(4) Bubuk ikan
-Kuwu			F(5)						M			(5) Pancing ulur & rawai dasar
-Ikan Lidah											F	
PELAGIS KECIL	F	O	F	O	O	O	F	F	M	M	M	
-Banyar	O	O		F	O							
-Kembung	O	O		F	O							
-Ikan Terbang	O					O		F				
-D. kuroides			M					F	M			
-D. macarellus	F						M-F	M	M			
-D. macrosoma	F			F	O		M-F					
-D. russelli	F			F	O							
-Golok-golok	M											
-lemuru			O(6)									(6) Selat Bali
TUNA BESAR												Note: Pelagis besar non tuna
-Cakalang	M	M	M			M	M	M	M	M		- Tongkol
-Albakora		F	F									- Tenggiri
-Madidihang		O	F			O	F	F	F	F		- Setuhuk
-Mata besar			O			F	O	O	O	O		- Layaran
-SBT			O									- Lemadang
Cumi-cumi			M	M			M					

KETERANGAN:

- O Over-exploited
- F Fully-exploited
- M Moderate
- M-F Moderate to Fully-exploited

Sumber: Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Purbayanto 2011).